

TRANSFORMASI KURIKULUM PAI DI INDONESIA: DARI KOLONIALISME HINGGA KURIKULUM MERDEKA

Amalia Desy Wahyuni¹, Buna'i²
^{1,2} Universitas Islam Negeri Madura, Indonesia

Email: amaliadesywahyuni@gmail.com



DOI: <https://doi.org/10.34125/jkps.v11i1.1849>

Sections Info

Article history:

Submitted: 13 January 2026
Final Revised: 24 January 2026
Accepted: 10 February 2026
Published: 24 February 2026

Keywords:

Transformation
Curriculum
PAI
Education history



ABSTRAK

The development of the Islamic Education (PAI) curriculum in Indonesia is closely related to the historical, ideological, and socio-educational dynamics of the nation. The PAI curriculum has undergone significant transformations, from a normative-doctrinal pattern in its early days to a more applicable, contextual, and adaptive approach in the contemporary era. These changes have been influenced by the challenges of globalization, radicalism, secularism, and the development of digital technology. This study aims to examine the historical journey of the development of the PAI curriculum in Indonesia and analyze its challenges and future direction. The research uses a descriptive qualitative approach with a library research method through the examination of historical documents, educational policies, and relevant academic literature. The results of the study show that although the transformation of the PAI curriculum has been ongoing, its implementation still faces various obstacles, such as the dominance of lecture methods, inequality in educational resources, and the suboptimal integration of religious moderation and digital literacy. Therefore, this study emphasizes the importance of reconstructing the PAI curriculum to integrate Islamic values with 21st-century competencies, strengthen teacher capacity, and provide schools with autonomy to realize moderate, contextual, and inclusive religious education.

ABSTRAK

Pengembangan kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) di Indonesia memiliki keterkaitan yang erat dengan dinamika historis, ideologis, dan sosio-pendidikan bangsa. Kurikulum PAI mengalami transformasi signifikan, mulai dari pola normatif-doktrinal pada masa awal hingga pendekatan yang lebih aplikatif, kontekstual, dan adaptif pada era kontemporer. Perubahan tersebut dipengaruhi oleh tantangan globalisasi, radikalisme, sekularisme, serta perkembangan teknologi digital. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perjalanan historis perkembangan kurikulum PAI di Indonesia serta menganalisis tantangan dan arah masa depannya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kepustakaan (library research) melalui penelaahan dokumen historis, kebijakan pendidikan, serta literatur akademik yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun transformasi kurikulum PAI telah berlangsung secara berkelanjutan, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, seperti dominasi metode ceramah, ketimpangan sumber daya pendidikan, serta belum optimalnya integrasi moderasi beragama dan literasi digital. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan pentingnya rekonstruksi kurikulum PAI yang mampu mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dengan kompetensi abad ke-21, memperkuat kapasitas guru, serta memberikan ruang otonomi sekolah guna mewujudkan pendidikan agama yang moderat, kontekstual, dan inklusif.

Kata kunci: Transformasi, kurikulum, PAI, sejarah pendidikan

PENDAHULUAN

PAI memegang peranan strategis dalam membentuk karakter dan kepribadian peserta didik di Indonesia (Latifah, 2023). Di tengah kompleksitas tantangan moral, sosial dan budaya yang semakin meningkat, PAI hadir sebagai instrumen penting untuk menanamkan nilai-nilai spiritual, etika dan kemanusiaan yang berakar pada ajaran Islam (Gani dkk., 2024). Tidak hanya menekankan pada aspek kognitif, PAI juga menargetkan perkembangan afektif dan psikomotorik peserta didik agar menjadi pribadi yang beriman, berakhlak mulia dan bertanggung jawab sebagai warga negara (Putra, 2023).

Namun demikian, PAI di sekolah masih menghadapi tantangan serius dalam hal relevansi isi, pendekatan pedagogis dan kesesuaian dengan konteks digital dan pluralisme sosial. Kurikulum yang dirancang belum sepenuhnya mampu mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dengan kompetensi abad 21 seperti berpikir kritis, kreativitas dan literasi digital.

Sebagian besar, teori kurikulum yang digunakan dalam penyusunan PAI masih berbasis pada pendekatan tradisional (normatif-doktrinal) yang tidak sepenuhnya menjawab kebutuhan pembelajaran modern. Masih banyak penelitian terdahulu menyoroti aspek sejarah kurikulum PAI atau evaluasi kebijakan kurikulum tertentu (seperti KTSP atau K13), namun sedikit yang membahas bagaimana guru PAI dan siswa benar-benar mengalami proses kurikulum secara kontekstual dan dinamika kehidupan digital dan masyarakat multikultural.

Sebuah penelitian menunjukkan bahwa banyak guru PAI di Indonesia masih dominan menggunakan metode ceramah meskipun kurikulum 2013 (K13) mengamanatkan pendekatan saintifik dan diskusi. Hal itu menunjukkan bahwa 76% guru PAI terutama menggunakan ceramah. Alasan untuk ini termasuk efektivitas yang dirasakan, kemudahan penerapan dan kondisi kelas yang kondusif (Sumarsih & Wirdati, 2022). Sementara pendekatan saintifik telah menunjukkan efek positif pada keterlibatan siswa, implementasinya menghadapi tantangan seperti waktu kelas yang terbatas dan kurangnya antusiasme siswa (Toyibi dkk., 2023). Beberapa sekolah berjuang dengan media dan sumber belajar yang tidak memadai (Ariani, 2020). Selain itu, beberapa guru PAI kurang memahami pendekatan saintifik, sehingga menghambat implementasinya yang tepat (Neliwati dkk., 2023). Meskipun terdapat tantangan-tantangan ini, faktor-faktor yang mendukung pendekatan ilmiah meliputi pelatihan K-13, persiapan guru dan ketersediaan sumber daya belajar di beberapa sekolah (Toyibi dkk., 2023).

Penelitian lain menyoroti tantangan dan peluang PAI di era digital. Perlu adanya rekonstruksi materi PAI agar lebih relevan dengan konteks digital dengan tetap menjaga nilai-nilai dasar Islam. Integrasi kearifan lokal dan literasi digital dalam PAI diusulkan sebagai solusi strategis untuk membangun generasi yang beriman, bertaqwa dan siap menghadapi tantangan era digital (Muflihini, 2024). Penelitian menekankan pentingnya kurikulum PAI yang lebih adaptif dan responsif yang berfokus pada pengembangan kompetensi yang meliputi pengetahuan, keterampilan dan sikap moral sesuai dengan ajaran Islam (Irmawati, 2024). Peran guru PAI sangat krusial dalam membimbing peserta didik untuk meminimalisir dampak negatif era digital, menuntut guru untuk terus meningkatkan kompetensi digitalnya dan berkolaborasi dengan orang tua untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung (Lestari & Jupriaman, 2024).

Oleh karena itu, keberadaan kurikulum memiliki posisi sentral dalam sistem pendidikan nasional. Kurikulum bukan hanya sekadar dokumen administratif, melainkan merupakan peta jalan (*roadmap*) yang mengarahkan proses pendidikan menuju tujuan yang diharapkan (Setiyorini & Setiawan, 2023). Dalam konteks PAI, kurikulum berfungsi sebagai instrumen untuk mengatur substansi ajaran Islam yang diajarkan, pendekatan yang

digunakan serta kompetensi spiritual dan moral yang hendak dibentuk pada diri peserta didik.

Sejak masa kolonial hingga era reformasi saat ini, kurikulum PAI terus mengalami transformasi, baik dari segi pendekatan, metode pembelajaran maupun materi ajarnya (M dkk., 2025). Perubahan tersebut tidak lepas dari pengaruh ideologi negara, perkembangan pemikiran pendidikan Islam serta tantangan kehidupan modern yang menuntut pendidikan agama yang lebih kontekstual dan dialogis.

Melalui artikel ini, ada dua hal yang menjadi rumusan masalah yaitu tentang bagaimana sejarah perkembangan kurikulum PAI di Indonesia dan bagaimana tantangan dan arah masa depan kurikulum PAI. Sehingga, dengan adanya pembaruan kurikulum menjadi keniscayaan agar PAI tetapi relevan sebagai pilar pembentukan akhlak dan kepribadian generasi muda Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini dipilih untuk menggali secara mendalam dinamika historis, kebijakan dan transformasi kurikulum PAI di Indonesia dari masa ke masa. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena perkembangan kurikulum PAI secara holistik berdasarkan narasi histoirs, dokumen resmi dan literatur akademik yang relevan.

Sumber data utama dalam artikel ini adalah dokumen-dokumen historis, kebijakan pendidikan nasional serta hasil-hasil penelitian terdahulu yang telah dipublikasikan dalam jurnal ilmiah, buku referensi dan dokumen kementerian yang berkaitan dengan kurikulum PAI. Literatur yang dijadikan acuan dipilih secara purposif, yaitu berdasarkan relevansi, aktualitas dan kontribusinya terhadap analisis perkembangan kurikulum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Perkembangan Kurikulum PAI di Indonesia

Perkembangan kurikulum PAI di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari dinamika sejarah bangsa, perubahan kebijakan nasional, serta pergeseran paradigma keagamaan dan sosial (Addzaky & Sukiman, 2024). Setiap fase sejarah membawa corak dan orientasi tersendiri terhadap bagaimana PAI diajarkan di sekolah-sekolah formal. Berikut pembahasan sejarah perkembangan kurikulum PAI di Indonesia dari masa ke masa:

1. Masa Pra Kemerdekaan

Sebelum kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, sistem pendidikan nasional belum terbentuk secara utuh dan merata. Pendidikan di wilayah Nusantara sangat dipengaruhi oleh kepentingan kolonial Belanda, yang membatasi akses pendidikan hanya untuk kelompok tertentu (Ridhotullah dkk., 2024). Dalam konteks ini, PAI berkembang bukan melalui sistem negara, tetapi melalui jalur pendidikan masyarakat berbasis pesantren, surah dan madrasah (Susilo & Wulansari, 2020). Lembaga-lembaga ini menjadi pusat utama pembelajaran agama bagi umat Islam Indonesia.

Pada masa kolonial, pemerintah Belanda menerapkan sistem pendidikan yang sangat selektif (Rahman, 2018). Sekolah-sekolah formal seperti Hollandsch-Inlandsche School (HIS), Europeesche Lagere School (ELS) dan Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO) disediakan untuk kalangan yang dianggap terpilih yakni kelompok priyayi, yaitu bangsawan atau *elite* tradisional yang telah mengalami birokratisasi (Siregar, 2016).

Namun, sistem pendidikan kolonial itu mengabaikan pelajaran agama, terutama Islam.

Pemerintah kolonial sengaja menyingkirkan unsur keagamaan karena khawatir terhadap potensi Islam dalam membangkitkan semangat perlawanan (Rasmana & Sumiyatun, 2021). Pelajaran agama hanya diajarkan secara terbatas, jika pun ada dan lebih bersifat seremonial atau administratif bukan sebagai pilar pembentukan karakter. Akibatnya, meskipun kalangan priyayi mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi secara formal, mereka juga menjadi bagian dari proses sekularisasi pendidikan kolonial.

Berbeda dengan pendidikan kolonial yang elit dan eksklusif, lembaga pendidikan Islam justru tumbuh dari bawah dan inklusif. Pesantren dan madrasah tidak hanya membuka akses kepada kalangan santri dari rakyat jelata, seperti petani, buruh dan pedagang kecil tetapi juga mengembangkan kurikulum yang berakar pada tradisi keilmuan Islam (Tantowi, 2022). Pesantren menjadi pusat pembentukan karakter, keilmuan serta spiritualitas masyarakat muslim. Materi yang diajarkan di lembaga-lembaga ini meliputi: Al-Qur'an dan ilmu tajwid; Kitab-kitab klasik (kitab kuning) dalam bidang fikih, tauhid, tafsir dan akhlak; Bahasa arab (nahwu dan sharaf); Ilmu alat dan ushul fiqh.

Dalam pelaksanaan pendidikan di pesantren tentu menggunakan metode pembelajaran seperti sorogan, bandongan dan hafalan digunakan untuk memastikan penguasaan materi secara mendalam dan berkesinambungan (Sudrajat, 2017). Kurikulum PAI pada masa pra kemerdekaan tidak hanya mengajarkan aspek ritual dan normatif Islam, tetapi juga membentuk kesadaran sosial dan identitas keumatan (Nurhayati, 2016). Dalam konteks marginalisasi pendidikan rakyat oleh kolonial, pesantren menjadi benteng perlawanan budaya dan ideologi terhadap dominasi Barat.

Lebih dari itu, banyak pesantren menjadi tempat persemaian tokoh-tokoh pembaru dan pejuang kemerdekaan (Wahyuddin, 2016). KH. Ahmad Dahlan (pendiri Muhammadiyah), KH. Hasyim Asy'ari (pendiri Nahdlatul Ulama) dan Hj. Agus Salim adalah contoh tokoh-tokoh besar yang dibentuk oleh sistem pendidikan Islam di luar jalur kolonial (Yuniendel, 2024). Oleh karena itu, kurikulum PAI menjadi alat strategis dalam membangun kesadaran nasional dan keberpihakan kepada masyarakat luas.

Kesenjangan antara pendidikan kolonial yang bersifat sekuler dan elit dengan pendidikan Islam yang bersifat tradisional menciptakan dikotomi pendidikan yang panjang (Husin, 2023). Kalangan priyayi yang mendapat akses pendidikan Barat lebih cenderung berorientasi pada posisi sosial dan birokrasi, sementara masyarakat umum menemukan nilai-nilai pembebasan dan kebermaknaan dalam pendidikan Islam (Rohayatin, 2021).

Dengan demikian, perkembangan kurikulum PAI pada masa pra kemerdekaan mencerminkan perlawanan terhadap sistem pendidikan kolonial yang eksklusif dan sekuler. Ketika akses pendidikan formal dibatasi untuk kalangan priyayi dan tidak mengakomodasi pelajaran agama, pesantren dan madrasah justru menjadi pusat pembelajaran keislaman yang merakyat dan inklusif. Kurikulum PAI pada periode ini berfungsi bukan hanya sebagai media pendidikan spiritual, tetapi juga sebagai sarana membentuk identitas dan kesadaran sosial politik masyarakat muslim. Warisan historis inilah yang kemudian menjadi fondasi penting dalam pembentukan kurikulum PAI di masa kemerdekaan dan setelahnya.

2. Masa Orde Lama

a. Kurikulum 1947: Titik Awal PAI dalam Sistem Pendidikan Nasional

Kurikulum 1947 adalah kurikulum pertama yang disusun oleh pemerintah Indonesia setelah merdeka (Anam & Solihah, 2024). Disebut juga sebagai Rencana Pelajaran Terurai, kurikulum ini pada dasarnya masih sangat dipengaruhi oleh model pendidikan Belanda (Hindia Belanda) (Putri & Maula, 2024). Namun, untuk pertama kalinya pendidikan agama secara formal mulai diakomodasi dalam sistem pendidikan nasional. Adapun posisi PAI

dalam kurikulum 1947 adalah sebagai berikut: Pendidikan agama diberikan sebagai mata pelajaran pilihan; Dapat diselenggarakan jika terdapat permintaan dari minimal 10 orang tua murid dalam satu sekolah; Pelaksananya tidak wajib dan tidak seragam di semua sekolah; Jam pelajaran sangat terbatas, umumnya satu jam pelajaran dalam seminggu.

Faktanya di lapangan menunjukkan bahwa penerapan pendidikan agama sangat bergantung pada kondisi sosiokultural setempat (Hayati & Herawati, 2022). Di kota-kota besar dan daerah dengan mayoritas muslim, seperti di sebagian Jawa dan Sumatra, pelajaran agama mulai diadakan, meski dengan keterbatasan guru dan sarana. Namun, di banyak daerah lain, terutama yang minim tenaga pendidik agama, pelajaran ini tidak terlaksana sama sekali.

b. Kurikulum 1952: Awal Formulasi Sistematis PAI

Lima tahun setelah diberlakukannya kurikulum 1947, pemerintah memperkenalkan kurikulum 1952 yang mulai menampilkan ciri khas Indonesia dan keluar dari bayang-bayang kurikulum kolonial (Putri dkk., 2025). Kurikulum ini mencerminkan semangat kebangsaan dan kebutuhan pembinaan karakter bangsa melalui pendidikan. Ciri pokok kurikulum 1952 adalah sebagai berikut: Memperjelas tujuan pendidikan nasional yang mencakup pembentukan manusia beriman, bertakwa dan berbudi luhur; PAI tetap tidak wajib secara menyeluruh, namun diberi ruang lebih besar dan diakui secara formal; Materi PAI lebih terstruktur dan mulai mencakup akidah, ibadah, akhlak, sejarah Nabi dan sahabat serta pengenalan al-Qur'an; Pemerintah melalui Kementerian Agama mulai menyusun buku teks pelajaran agama secara nasional.

Kurikulum ini juga didukung oleh penguatan kelembagaan untuk mendidik guru agama secara formal. Pemerintah mendirikan lembaga seperti PGAP (Pendidikan Guru Agama Pertama) dan PGAN (Pendidikan Guru Agama Negeri) yang mencetak guru-guru agama dengan latar belakang pendidikan keguruan, bukan hanya keagamaan semata (Listiana, 2019).

Secara faktual, pelaksanaan kurikulum 1952 pada masa ini, pendidikan formal lebih banyak diakses oleh kalangan priyayi, yaitu kaum bangsawan, pegawai pemerintah dan *social elite* yang sudah sejak zaman kolonial memiliki *privilege* dalam pendidikan (Arifin, 2022). Anak-anak dari kalangan bawah atau desa masih banyak yang mengandalkan pendidikan non formal melalui pesantren, langgar atau pengajian kampung yang mengajarkan Islam secara tradisional. Dengan demikian, meskipun PAI telah masuk ke dalam sistem kurikulum nasional, distribusi manfaatnya masih belum merata. Ketimpangan sosial dan geografis sangat memengaruhi keberhasilan implementasinya di lapangan.

3. Masa Orde Baru

a. Kurikulum 1968: Reorientasi Nasionalisme dan Keagamaan

Kurikulum 1968 disusun sebagai bentuk koreksi terhadap sistem pendidikan sebelumnya yang dianggap terlalu ideologis dan terpolarisasi (Machali, 2014). Diresmikan di awal periode baru, kurikulum ini berupaya menekankan kembali peran agama dalam pembentukan moral bangsa (Nisa dkk., 2024).

Dalam konteks PAI, kurikulum ini memuat tiga pokok bahasan utama, yaitu aqidah, ibadah dan akhlak. Pembelajaran agama ditujukan untuk membentuk manusia beriman dan bertakwa, dengan penekanan pada kesalehan pribadi dan kepatuhan terhadap norma agama (Choli, 2019). Di sekolah-sekolah dasar dan menengah, PAI mulai menjadi mata pelajaran wajib, meskipun pelaksanaannya belum merata karena keterbatasan guru agama dan minimnya buku pelajaran standar.

Secara pedagogis, pendekatan pembelajaran masih sangat tradisional. Guru menjadi pusat pengetahuan dan murid hanya dituntut untuk menghafal doktrin agama. Namun, secara politik kurikulum ini menjadi titik awal reintegrasi pendidikan agama ke dalam sistem pendidikan nasional pasca reformasi ideologis orde lama.

b. Kurikulum 1975: Rasionalisasi Pembelajaran dan melalui Pendekatan Tujuan

Kurikulum 1975 menandai perubahan paradigma dalam dunia pendidikan nasional melalui penerapan pendekatan Tujuan Intruksional Umum (TIU) dan Tujuan Intruksional Khusus (TIK) (Putri & Maula, 2024). Kurikulum ini disusun dengan semangat efisiensi dan efektivitas, seiring gelombang pembangunan nasional yang menuntut sumber daya manusia yang rasional dan produktif.

Dalam bidang PAI, penerapan TIU dan TIK mendorong perumusan tujuan pembelajaran secara lebih terukur. Materi pelajaran disusun berdasarkan jenjang usia dan jenjang berpikir peserta didik. PAI tidak hanya mengajarkan ajaran agama, tetapi juga dimaksudkan untuk menumbuhkan kesadaran akan nilai-nilai agama dalam kehidupan sosial.

Namun, implementasi kurikulum ini menemui kendala metodologis. Guru agama terutama di daerah-daerah, kesulitan merumuskan tujuan intruksional yang operasional. Buku ajar belum banyak disesuaikan dengan pendekatan baru ini, sehingga pembelajaran cenderung tetap bersifat verbalis dan berpusat pada guru.

c. Kurikulum 1984: Pendekatan Keterampilan Proses dalam Pembelajaran PAI

Kurikulum 1984 memperkenalkan pendekatan keterampilan proses sebagai jawaban atas kritik terhadap pendekatan mekanistik kurikulum 1975 (Mbato, 2022). Kurikulum ini berusaha menjadikan proses belajar sebagai pengalaman yang bermakna, dengan siswa sebagai subjek aktif dalam pembelajaran (Wahyuni, 2015).

Dalam PAI, pendekatan ini sangat revolusioner karena mendorong siswa untuk memahami dan mengamalkan nilai-nilai agama melalui aktivitas yang kontekstual, seperti diskusi, simulasi ibadah, studi kasus dan proyek sosial. Tujuan utamanya adalah menumbuhkan keterampilan berpikir kritis serta kesadaran etis dan spiritual dalam kehidupan sehari-hari.

Penerapan kurikulum ini relatif bervariasi. Sekolah-sekolah di kota besar mulai mempraktikkan pendekatan ini dengan baik, terutama yang memiliki guru-guru agama yang sudah terlatih. Namun di banyak sekolah, keterampilan proses belum mampu diterapkan secara optimal karena kekurangan fasilitas, lemahnya supervisi pendidikan dan kurangnya pelatihan guru yang memadai.

d. Kurikulum 1994: Integrasi dan Pelembagaan Pendidikan Karakter

Kurikulum 1994 merupakan kristalisasi dari pengalaman-pengalaman sebelumnya (Hadi, 2025). Kurikulum ini menggabungkan pendekatan isi dan proses serta menekankan pentingnya keseimbangan antara aspek kognitif, afektif dan psikomotorik (Adam & Wahdiah, 2023). Kurikulum ini juga mengukuhkan PAI sebagai bagian integral dari pendidikan karakter bangsa.

Salah satu ciri khasnya adalah penambahan jam pelajaran PAI di setiap jenjang pendidikan serta pelembagaan penilaian aspek sikap dan praktik ibadah. Materi PAI diperluas mencakup ibadah, akhlak, fikih, sejarah kebudayaan Islam dan pengenalan terhadap kehidupan sosial berbasis nilai-nilai Islam.

Secara nasional, kurikulum ini dianggap sebagai puncak perhatian negara terhadap pendidikan agama, karena pemerintah juga menerbitkan buku ajar PAI nasional dan mulai mendorong standarisasi ujian akhir mata pelajaran agama. Namun tantangan tetap ada,

terutama dalam memastikan kualitas pembelajaran tetap konsisten di seluruh daerah.

4. Masa Reformasi

a. Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK)

Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) yang secara resmi diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional (Kepmendiknas) No. 045/U/2002 dan mulai diimplementasikan secara luas pada tahun 2004, menjadi titik awal perubahan struktur pendidikan nasional pasca orde baru (Suswandari, 2021, hlm. 17). Kurikulum ini memperkenalkan pendekatan berbasis kompetensi, yakni menitikberatkan pada penguasaan keterampilan dan sikap siswa, bukan sekadar penguasaan materi (Laterman & Murniarti, 2024). Dalam konteks PAI, KBK berupaya menanamkan nilai-nilai keislaman melalui pembelajaran yang lebih kontekstual dan aplikatif.

PAI tidak lagi diajarkan sebagai dogma hafalan semata, tetapi diarahkan untuk membentuk peserta didik yang mampu menerapkan nilai-nilai agama dalam kehidupan nyata. Kompetensi dasar dan indikator pencapaian hasil belajar dirancang agar siswa mampu menginternalisasi nilai spiritual, memahami ajaran dan menunjukkan sikap keberagaman dalam perilaku sehari-hari. Namun demikian, keterbatasan kapasitas guru dalam memahami konsep kompetensi serta minimnya dukungan buku ajar dan perangkat pembelajaran menjadi hambatan signifikan dalam penerapannya di banyak sekolah, terutama di daerah.

b. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)

Sebagai kelanjutan dari KBK, pemerintah melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) nomor 22 dan 23 tahun 2006 mengesahkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) (Aisyah, 2022). Kurikulum ini menguatkan semangat otonomi sekolah dan desentralisasi pendidikan, dengan memberi keleluasaan kepada satuan pendidikan untuk menyusun silabus sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik serta kondisi sosial budaya lokal (Zainullah & Ali, 2023).

Dalam KTSP, pendidikan agama termasuk PAI tetap menjadi mata pelajaran wajib, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 12 ayat 1. Muatan lokal dan budaya keislaman dalam konteks setempat dapat diakomodasi dalam pengembangan silabus PAI. Hal ini memungkinkan terjadinya variasi pendekatan dan konten di berbagai sekolah, tergantung pada kemampuan guru dan kondisi lingkungan.

c. Kurikulum 2013

Dengan semangat untuk memperkuat pendidikan karakter bangsa, pemerintah mengembangkan Kurikulum 2013 (K13) melalui Permendikbud nomor 18A tahun 2013 (Lestari dkk., 2019, hlm. 208). Kurikulum ini secara eksplisit memuat tujuan untuk membentuk insan Indonesia yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia serta memiliki kemampuan berpikir kritis dan kreatif (Sukriyatun, 2022). Dalam struktur kurikulum, mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti disatukan guna memperkuat integrasi antara aspek kognitif dan afektif.

Kurikulum 2013 memandang PAI sebagai pilar penting dalam pembentukan Profil Pelajar Pancasila. Materi pembelajaran PAI mencakup dimensi iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta integrasi nilai-nilai sosial seperti toleransi, keadilan dan tanggung jawab. Guru tidak hanya dituntut mengajarkan isi ajaran, tetapi juga menjadi teladan dalam perilaku spiritual.

Implementasi kurikulum ini juga diiringi dengan penyediaan buku ajar oleh Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta pelatihan guru

secara bertahap. Namun, berbagai tantangan muncul seperti beban administrasi penilaian yang berat, penafsiran yang beragam terhadap indikator sikap dan masih terbatasnya kemampuan guru dalam menerapkan pendekatan saintifik dan penilaian autentik secara konsisten.

d. Kurikulum Merdeka

Sebagai respon terhadap krisis pembelajaran selama pandemi COVID-19 serta tuntutan fleksibilitas abad ke-21, pemerintah memperkenalkan Kurikulum Merdeka melalui Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) No. 033/H/KR/2022 (Efriani dkk., 2024). Kurikulum ini menekankan pembelajaran yang berpusat pada siswa, berdiferensiasi serta berbasis pada penguatan karakter dan kompetensi esensial (Halimah dkk., 2023).

Dalam Kurikulum Merdeka, mata pelajaran PAI tetap memiliki kedudukan yang strategis dalam membentuk profil pelajar yang religius, nasionalis, mandiri dan gotong royong. Pembelajaran PAI diarahkan pada pemahaman nilai keagamaan yang adaptif, kontekstual dan terbuka terhadap dinamika sosial. Salah satu ciri khasnya adalah keterlibatan PAI dalam proyek penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5), yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan isu-isu aktual seperti keberagaman, tanggung jawab sosial dan kepedulian lingkungan.

Kurikulum ini memberi ruang yang luas bagi guru untuk menyusun modul ajar sesuai dengan kebutuhan siswa dan konteks lokal. Namun dalam praktiknya, tantangan terbesar adalah kesiapan guru dalam merancang pembelajaran mandiri, kemampuan digital yang belum merata dan keterbatasan fasilitas penunjang, khususnya di sekolah-sekolah di desa.

Tantangan dan Arah Masa Depan Kurikulum PAI

1. Globalisasi, Radikalisme dan Sekularisme

Pertama, globalisasi dan perubahan nilai. Globalisasi tidak hanya menciptakan keterhubungan ekonomi dan teknologi antar negara, tetapi juga memengaruhi sistem nilai, budaya dan pola pikir masyarakat. Arus informasi yang cepat dan terbuka melalui internet serta media sosial memberikan peluang sekaligus tantangan bagi pendidikan agama. Peserta didik kini berada dalam ruang interaksi global yang plural, dimana nilai-nilai lokal keagamaan harus bersaing dengan nilai-nilai universal yang belum tentu selaras dengan prinsip Islam atau karakter kebangsaan Indonesia.

Kedua, tantangan radikalisme agama. Radikalisme dalam konteks keagamaan muncul sebagai respons terhadap ketidakadilan sosial, politik identitas, maupun krisis moral yang dirasakan sebagian kelompok. Di Indonesia, radikalisme berkembang melalui narasi-narasi eksklusif yang menolak keberagaman dan cenderung membenturkan ajaran agama dengan ideologi negara. Fenomena ini telah menyusup ke ruang-ruang pendidikan, bahkan di sekolah umum dan perguruan tinggi, melalui konten keagamaan yang sempit, intoleran, dan tidak kontekstual.

Ketiga, sekularisme dan krisis spiritualitas. Sekularisme sebagai ideologi pemisahan antara agama dan kehidupan publik menjadi tantangan tersendiri dalam pendidikan agama. Di tengah tuntutan rasionalitas, efisiensi dan pragmatisme modern, nilai-nilai spiritual dan moral kerap terpinggirkan. Sekularisme tidak hanya hadir sebagai sistem kenegaraan di luar Islam, tetapi juga sebagai cara berpikir yang secara perlahan merasuk dalam kurikulum dan kebijakan pendidikan yang menitikberatkan aspek kognitif dan keterampilan teknis semata.

Ketiga tantangan di atas menuntut adanya transformasi kurikulum PAI yang lebih adaptif, kontekstual, dan progresif. Kurikulum harus dirancang tidak hanya berdasarkan

konten tekstual semata, tetapi juga melalui pendekatan interdisipliner, inklusif, dan berbasis pada nilai-nilai universal Islam yang sejalan dengan prinsip kebangsaan. Penguatan pendidikan karakter melalui kurikulum Merdeka dan proyek penguatan Profil Pelajar Pancasila menjadi peluang penting dalam meletakkan fondasi keislaman yang moderat dan terbuka terhadap perbedaan.

2. Inovasi Digital dan Kebutuhan Pembelajaran Abad 21

Pertama, inovasi digital dalam kurikulum PAI. Perkembangan teknologi digital telah mengubah lanskap pendidikan secara fundamental, termasuk dalam ranah PAI. Di era digital ini, penyampaian materi keagamaan tidak lagi cukup dilakukan melalui pendekatan verbalistik dan hafalan semata, melainkan harus dikemas secara kreatif dan kontekstual melalui pemanfaatan teknologi. PAI kini dituntut untuk tidak hanya menyampaikan ajaran normatif, tetapi juga mampu menjangkau kehidupan digital peserta didik yang sehari-harinya akrab dengan media sosial, video daring dan aplikasi digital lainnya.

Kedua, kebutuhan pembelajaran abad 21. Selain inovasi teknologi, kurikulum PAI juga harus responsif terhadap kebutuhan pembelajaran abad 21. Era ini menuntut peserta didik memiliki kompetensi berpikir kritis, kreatif, mampu berkomunikasi secara efektif dan bekerja sama dalam keberagaman (4C: *critical thinking, creativity, communication, collaboration*). PAI tidak dapat dipisahkan dari tuntutan tersebut, karena agama juga menjadi basis nilai dalam mengembangkan karakter dan kemampuan berpikir peserta didik secara holistik.

Untuk memperjelas temuan terkait inovasi digital dan kebutuhan pembelajaran abad ke-21 dalam Pendidikan Agama Islam, hasil penelitian terdahulu yang relevan disajikan dalam bentuk tabel sintesis. Penyajian ini bertujuan untuk memudahkan dalam memahami pola temuan, kecenderungan masalah, serta arah pengembangan kurikulum PAI berbasis digital dan kompetensi abad ke-21.

Tabel 1. Sintesis Hasil Penelitian tentang Inovasi Digital dan Pembelajaran Abad 21 dalam PAI

Aspek yang Dikaji	Temuan Penelitian	Sumber
Pendekatan pembelajaran PAI	Pembelajaran PAI masih didominasi metode ceramah dan berorientasi hafalan, meskipun kurikulum menuntut pendekatan saintifik dan partisipatif	(Neliwati dkk., 2023; Sumarsih & Wirdati, 2022)
Pemanfaatan teknologi digital	Pemanfaatan media digital dalam pembelajaran PAI masih terbatas dan belum terintegrasi secara sistematis dalam kurikulum	(Ariani, 2020; Lestari & Jupriaman, 2024)
Literasi digital keagamaan	Rendahnya literasi digital keagamaan berpotensi membuka ruang masuknya pemahaman keagamaan yang tidak moderat	(Muflihini, 2024)
Kompetensi abad ke-21 (4C)	Kurikulum PAI belum sepenuhnya mengintegrasikan keterampilan berpikir kritis, kreativitas, komunikasi dan kolaborasi dalam pembelajaran	(Halimah dkk., 2023; Irmawati, 2024)
Peran guru PAI	Guru PAI memiliki peran strategis dalam pembelajaran digital, namun masih menghadapi keterbatasan kompetensi teknologi dan pedagogi digital	(Lestari & Jupriaman, 2024)
Arah pengembangan kurikulum	Diperlukan kurikulum PAI yang	(Amiruddin dkk., 2023; Efriani

adaptif, kontekstual dan dkk., 2024)
 terintegrasi dengan teknologi
 untuk menjawab tantangan abad
 ke-21

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa tantangan utama dalam pembelajaran PAI abad ke-21 terletak pada belum optimalnya integrasi teknologi digital dan kompetensi 4C dalam praktik pembelajaran. Dominasi metode ceramah, keterbatasan literasi digital guru, serta lemahnya pemanfaatan media pembelajaran berbasis teknologi menunjukkan adanya kesenjangan antara tuntutan kurikulum dan implementasi di lapangan. Temuan ini menegaskan urgensi transformasi kurikulum PAI yang tidak hanya adaptif secara substansi, tetapi juga inovatif dalam pendekatan pedagogis.

3. Rekomendasi Penguatan Kurikulum PAI yang Relevan dan Moderat

Pertama, memperkuat nilai moderasi beragama. Kurikulum PAI harus secara eksplisit menanamkan prinsip-prinsip moderasi beragama yang selaras dengan visi Kementerian Agama dalam program penguatan moderasi beragama nasional. Penerapan nilai-nilai ini dapat diintegrasikan dalam materi akidah, fikih, sejarah dan akhlak, tidak hanya sebagai teori, tetapi dalam bentuk studi kasus, narasi historis dan contoh kehidupan sosial-keagamaan yang kontekstual.

Kedua, integrasi nilai Islam dengan kehidupan sosial-modern. Kurikulum PAI harus menjembatani ajaran Islam dengan tantangan dunia nyata. Nilai-nilai seperti keadilan, amanah, kejujuran, kerja keras, dan cinta lingkungan harus dikontekstualisasikan dalam isu-isu modern seperti demokrasi, kesetaraan gender, etika digital, perubahan iklim dan ekonomi berbasis syariah. Ini akan mendorong peserta didik menginternalisasi nilai-nilai Islam tidak secara dogmatis, tetapi secara reflektif dan aplikatif.

Ketiga, penguatan kompetensi guru PAI. Kurikulum yang baik tidak akan berhasil tanpa kompetensi pendidik yang memadai. Guru PAI harus dibekali kemampuan pedagogis yang inklusif dan moderat, disertai literasi digital dan pemahaman terhadap isu-isu keislaman kontemporer. Pemerintah dan institusi pendidikan harus menyediakan pelatihan berkelanjutan tentang metode pembelajaran kritis, pendekatan tematik, serta pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran PAI.

Keempat, fleksibilitas kurikulum dan otonomi sekolah. Dalam semangat Kurikulum Merdeka, penguatan kurikulum PAI ke depan harus memberikan ruang kebebasan pada sekolah untuk mengembangkan materi lokal, pendekatan kontekstual, serta inovasi pembelajaran sesuai dengan karakteristik peserta didik. Otonomi ini harus dibarengi dengan panduan kurikulum yang adaptif, tidak terlalu rigid, namun tetap menjaga kerangka dasar keislaman dan nasionalisme.

Kelima, evaluasi kurikulum yang komprehensif dan responsif. Penguatan kurikulum PAI juga menuntut adanya sistem evaluasi yang bukan hanya bersifat kognitif, tetapi juga afektif dan psikomotorik. Asesmen yang digunakan harus mampu mengukur keterampilan berpikir kritis, empati sosial dan sikap keagamaan peserta didik secara holistik. Pemerintah perlu mengembangkan instrumen evaluasi yang mendorong pembelajaran bernilai proses, bukan sekadar hasil akhir.

Selain itu, evaluasi kurikulum harus dilakukan secara periodik, berbasis riset dan melibatkan pemangku kepentingan dari berbagai kalangan, baik itu akademisi, praktisi pendidikan, ormas Islam dan masyarakat. Hal ini akan memastikan kurikulum PAI tetap relevan dengan perkembangan zaman dan tetap teguh pada prinsip nilai-nilai Islam yang rahmatan lil 'alamin.

KESIMPULAN

Perkembangan kurikulum PAI di Indonesia mencerminkan dinamika historis, ideologis dan pedagogis bangsa dalam merespons tantangan zaman. Sejak masa kolonial hingga era Kurikulum Merdeka, PAI telah mengalami pergeseran dari pendekatan normatif-doktrinal menuju kurikulum yang lebih aplikatif, kontekstual dan responsif terhadap isu globalisasi dan keberagaman. Namun, kesenjangan antara desain kurikulum dan implementasi di lapangan masih menjadi persoalan serius, ditandai dengan dominasi metode ceramah, keterbatasan kompetensi guru serta belum optimalnya integrasi nilai-nilai Islam dengan isu kontemporer seperti toleransi, etika digital dan keadilan sosial. *Gap* teori, *gap* penelitian dan *gap* hasil dalam kurikulum PAI menunjukkan perlunya rekonstruksi paradigma pendidikan agama agar tidak hanya berorientasi pada transfer pengetahuan, tetapi juga pembentukan karakter yang inklusif dan moderat. Oleh karena itu, pengembangan kurikulum PAI ke depan harus menekankan pada penguatan moderasi beragama, fleksibilitas kontekstual, peningkatan kapasitas guru dan integrasi teknologi pembelajaran, sehingga PAI dapat berfungsi sebagai instrumen strategis dalam membentuk generasi yang religius, berwawasan kebangsaan dan tanggung menghadapi tantangan abad ke-21.

REFERENSI

- Adam, A., & Wahdiah. (2023). Analisis Dinamika Perkembangan Kurikulum di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(6). <https://doi.org/10.5281/zenodo.7791080>
- Addzaky, K. U., & Sukiman. (2024). Diskursus Aliran-Aliran Filsafat Pendidikan dalam Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam. *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian dan Kajian Sosial*, 21(2). <https://doi.org/10.46781/al-mutharahah.v21i02.1072>
- Aisyah, S. (2022). Pendidikan Islam Pada Masa Reformasi (1998-Sekarang). *Journal of Islamic Education El-Madani*, 2(1). <https://doi.org/10.55438/jiee.v2i1.39>
- Amiruddin, Simanjuntak, R., Meliala, H. P., Tarigan, N., & Ketaren, A. (2023). Perbandingan Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka. *JPDK: Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 5(1). <https://doi.org/10.31004/jpdk.v5i1.11934>
- Anam, Moh. S., & Solihah, M. (2024). Memahami Kebijakan Kurikulum Nasional Tahun 1947 dan 1952. *Jiip: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(8). <https://doi.org/10.54371/jiip.v7i8.5271>
- Anas, M. H., Bakti, S., Nasril, Y., & Adawiyah, R. (2025). Analisis Perkembangan Kurikulum Pendidikan Nasional di Indonesia dari Kurikulum 1947 hingga Kurikulum Merdeka: Studi Literatur. *Didaktika: Jurnal Kependidikan*, 14(1). <https://doi.org/10.58230/27454312.1978>
- Ariani. (2020). *Pengaruh Pendekatan Saintifik dalam Pembelajaran PAI Terhadap Keaktifan Peserta Didik Kelas IV-VI di SD Negeri 10 Tempilang*. Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik.
- Arifin, S. (2022). *Muhammadiyah Kiri: Haji Misbach yang Terlupakan dan Tersingkir*. UAD Press.
- Asiah, N., & Harjoni. (2024). Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Era Digital (Analisis Historis dan Perkembangan Sosiologis di Indonesia). *JRPP: Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, 7(4). <https://doi.org/10.31004/jrpp.v7i4.36122>
- Basyit, A. (2019). Dikotomi dan Dualisme: Pendidikan di Indonesia. *Tahdzibi: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 4(1). <https://doi.org/10.24853/tahdzibi.4.1.15-28>
- Choli, I. (2019). Pembentukan Karakter Melalui Pendidikan Islam. *Tahdzib: Jurnal Pendidikan Islam*, 2(2). <https://doi.org/10.34005/tahdzib.v2i2.511>
- Dalimunthe, D. S. (2023). Transformasi Pendidikan Agama Islam: Memperkuat Nilai-nilai Spiritual, Etika, dan Pemahaman Keislaman dalam Konteks Modern. *Al-Murabbi Jurnal*

- Pendidikan Islam*, 1(1). <https://doi.org/10.62086/al-murabbi.v1i1.426>
- Efriani, A., Hamzah, R. A., Sari, R., Tirta, G. A. R., Utami, G. A. O., Yawan, H., Suhendi, Hayati, R. M. N., Zulaeha, O., Istamala, M. S., Mutaqin, A., Rahmawati, S., Persada, Y. I., Yansa, H., Janna, M., & Effendi. (2024). Asesmen dalam Kurikulum Merdeka. *Penerbit Mifandi Mandiri Digital*, 1(1).
- Gani, A., Oktavani, M., & Suhartono. (2024). Pendidikan Agama Islam: Fondasi Moral Spiritualitas Bangsa. *Al-I'tibar: Jurnal Pendidikan Islam*, 11(3). <https://doi.org/10.30599/jrek7951>
- Hadi, I. A. (2025). Integrasi Kurikulum dan Pengetahuan dalam Meningkatkan Kualitas Pembelajaran. *Inspirasi: Jurnal Kajian dan Penelitian Pendidikan Islam*, 9(1). <https://doi.org/10.61689/inspirasi.v9i1.686>
- Halimah, N., Hadiyanto, & Rusdinal. (2023). Analisis Pembelajaran Berdiferensiasi Sebagai Bentuk Implementasi Kebijakan Kurikulum Merdeka. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 8(1). <https://doi.org/10.23969/jp.v8i1.7552>
- Hartono, Y. (2017). Pendidikan Nasional dan Kualitas Manusia Indonesia Dalam Perspektif Sejarah. *Agastya: Jurnal Sejarah dan Pembelajarannya*, 7(2). <https://doi.org/10.25273/ajsp.v7i2.1491>
- Hayati, C. I., & Herawati. (2022). Inovasi Kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) dalam Rangka Penanaman Nilai-Nilai Kearifan Lokal. *JES: Journal of Education Science*, 8(2). <https://doi.org/10.33143/jes.v8i2.2579>
- Husin. (2023). Pemikiran Pembaharuan Pendidikan Islam KH. Ahmad Dahlan Perspektif Intelektual Muslim di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Global Education*, 4(2). <https://doi.org/10.55681/jige.v4i2.784>
- Irmawati. (2024). Integrasi Nilai-Nilai Islam dalam Kurikulum PAI. *Al-Mikraj*, 4(2). <https://doi.org/10.37680/almikraj.v4i02.5421>
- Irsad, M. (2016). Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Madrasah (Studi Atas Pemikiran Muhaimin). *Iqra: Jurnal Kajian Ilmu Pendidikan*, 1(2).
- Kaimuddin. (2014). Implementasi Pendidikan Karakter dalam Kurikulum 2013. *Dinamika Ilmu: Journal of Education*, 14(1). <https://doi.org/10.21093/di.v14i1.7>
- Khasanah, N., Hamzani, A. I., & Aravik, H. (2022). *Pesantren Salafiyah dalam Lintasan Sejarah*. PT. Nasya Expanding Management.
- Laterman, N. M., & Murniarti, E. (2024). Filosofis Kurikulum Berbasis Kompetensi 2004 dan Kurikulum Merdeka: Tinjauan Kritis dari Sudut Pandang Ontologis. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 9(3). <https://doi.org/10.23969/jp.v9i3.15517>
- Latifah, E. (2023). Peran Guru Pendidikan Agama Islam dalam Pembinaan Karakter Siswa. *Jurnal Tahsinia*, 4(1). <https://doi.org/10.57171/jt.v4i1.357>
- Lestari, A. N. A., Rusdiawan, & Sudirman. (2019). Kemampuan Guru Melaksanakan Pembelajaran Bahasa Indonesia Berbasis Kurikulum 2013 di SMPN 1 Pujut, Nusa Tenggara Barat. *Lingua: Journal of Language, Literature and Teaching*, 16(2). <https://doi.org/10.30957/lingua.v16i2.603>
- Lestari, S., & Jupriaman. (2024). The Role Of Islamic Religious Education Teachers In The Digital Era. *Zeniusi Journal*, 1(1). <https://doi.org/10.70821/zj.v1i1.11>
- Listiana, H. (2019). Dinamika Politik Pendidikan Guru Agama Islam Pada Masa Orde Lama. *Jurnal Keislaman*, 2(2). <https://doi.org/10.54298/jk.v2i2.3386>
- M, N., Hamdan, & Cahyadi, A. (2025). Kurikulum Pendidikan Islam di Indonesia (Problematisa, Tantangan dan Lintasan Sejarah Kurikulum di Indonesia). *MICJO: Multidisciplinary Indonesian Center Journal*, 2(1). <https://doi.org/10.62567/micjo.v2i1.398>

- Machali, I. (2014). Kebijakan Perubahan Kurikulum 2013 dalam Menyongsong Indonesia Emas Tahun 2045. *Jurnal Pendidikan Islam*, 4(1). <https://doi.org/10.14421/jpi.2014.31.71-94>
- Mahrus. (2021). Desain Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam. *Annaba: Journal of Islamic Education*, 7(1). <https://doi.org/10.37286/ojs.v7i1.93>
- Maiwan, M. (2014). Gerakan Mahasiswa di Indonesia dalam Bingkai Kekuasaan Orde Baru (1966-1998). *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, 13(2).
- Mbato, C. L. (2022). *Pendidikan Indonesia Masa Depan: Tantangan, Strategi, Dan Peran Universitas Sanata Dharma*. Sanata Dharma University Press.
- Muflihini, A. (2024). Integrasi Kearifan Lokal dan Literasi Digital dalam Pendidikan Islam untuk Menghadapi Tantangan Abad 21. *Al-Fikri: Jurnal Studi dan Penelitian Pendidikan Islam*, 7(1). <https://doi.org/10.30659/jspi.7.1.56-67>
- Muhammedi. (2016). Perubahan Kurikulum di Indonesia: Studi Kritis tentang Upaya Menemukan Kurikulum Pendidikan Islam yang Ideal. *Jurnal Raudhah*, 4(1). <https://doi.org/10.30829/raudhah.v4i1.61>
- Neliwati, N., Safitri, D., Ramadhan, M. R., & Aqilla, N. P. (2023). Pelaksanaan Pembelajaran PAI pada Kurikulum 2013 melalui Pendekatan Saintifik Learning. *JiIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(3), 1684–1688. <https://doi.org/10.54371/jiip.v6i3.1433>
- Nisa, B. K., Saragih, M. A., Hasibuan, S. B., Jannah, Y. R., & Daulai, A. F. (2024). Perkembangan Kurikulum Pendidikan Sekolah Dasar Di UPT SD Negeri 060973 Medan Selayang. *Educurio: Education Curiosity*, 2(2). <https://doi.org/10.71456/ecu.v2i2.707>
- Nurhayati, A. (2016). *Membangun dari Keterpencilan: Soft Constructivism, Kesadaran Aktor dan Modernitas Dunia Pesantren di Pedesaan*. Penerbit Daulat Press.
- Putra, F. P. (2023). Pengembangan Tujuan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Indonesia. *At-Ta'dib: Jurnal Ilmiah Prodi Pendidikan Agama Islam*, 15(1). <https://doi.org/10.47498/tadib.v15i1.1731>
- Putri, D. S., Marzelni, Delastri, Y., Anggraini, D., Demina, & Darmansyah. (2025). Sejarah Perkembangan Kurikulum di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(1).
- Putri, Z. F., & Maula, N. (2024). Studi Literatur: Transformasi Kurikulum Indonesia 1947 Sampai Kurikulum Merdeka Dilihat dari Perspektif Model Kurikulum. *Jurnal Teknodik: Jurnal Teknologi Pendidikan*, 28(1). <https://doi.org/10.32550/teknodik.vi.1160>
- Rahman, K. (2018). Perkembangan Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia. *Tarbiyatuna: Kajian Pendidikan Islam*, 2(1).
- Rasmana, B., & Sumiyatun. (2021). *Ordonansi Guru: Kebijakan Pemerintah Kolonial Hindia Belanda Terhadap Guru Pendidikan Agama Islam (1905-1942)*. CV. Anugrah Utama Raharja.
- Ridhotullah, N. A., Nurmina, & Efendi, M. (2024). Pendidikan Islam Pada Masa Penjajahan Belanda. *Pandu: Jurnal Pendidikan Anak dan Pendidikan Umum*, 2(4). <https://doi.org/10.59966/pandu.v2i4.1380>
- Rohayatin, T. (2021). *Birokrasi Pemerintahan*. Deepublish.
- Sari, N. J. P. N., Sari, D. W., & Hermawati, K. A. (2023). Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam Melalui Pendekatan Rekonstruksi Sosial. *Raudhah Proud to be Professionals: Jurnal Tarbiyah Islamiyah*, 8(2). <https://doi.org/10.48094/raudhah.v8i2.313>
- Setiyorini, S. R., & Setiawan, D. (2023). Perkembangan Kurikulum Terhadap Kualitas Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 1(1). <https://doi.org/10.47134/jtp.v1i1.27>
- Siregar, E. (2016). Kebijakan Pemerintah Hindia Belanda Terhadap Pendidikan Kaum Bangsawan Indonesia (1900-1920). *Journal Education and Development*, 3(1). <https://doi.org/10.37081/ed.v3i1.411>

- Sudrajat, A. (2017). Pesantren Sebagai Transformasi Pendidikan Islam di Indonesia. *vicratin: Jurnal Pendidikan Islam*, 2(2).
- Sukriyatun, G. (2022). Pendidikan Karakter pada Kurikulum 2013 dan Perkembangannya Menuju Profil Pelajar Pancasila. *JPE: Primer Edukasi Journal*, 1(2). <https://doi.org/10.56406/jpe.v1i2.96>
- Sumarsih, T., & Wirdati, W. (2022). Enam Alasan Guru Menggunakan Metode Ceramah pada Mata Pelajaran PAI. *An-Nuha*, 2(1), 123–132. <https://doi.org/10.24036/annuha.v2i1.170>
- Susilo, A. A., & Wulansari, R. (2020). Sejarah Pesantren Sebagai Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia. *Tamaddun: Jurnal Kebudayaan dan Sastra Islam*, 10(2). <https://doi.org/10.19109/tamaddun.v20i2.6676>
- Suswandari, M. (2021). *Bunga Rampai Pendidikan: Perspektif Inovasi dan Kebijakan*. Lakeisha.
- Sya'bani, M. A. Y. (19M). Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam dalam Perspektif Pendidikan Nilai. *Tamaddun: Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Keagamaan*, 2(2018). <https://doi.org/10.30587/tamaddun.v0i0.699>
- Tantowi, A. (2022). *Pendidikan Islam di Era Transformasi Global*. Pustaka Rizki Putra.
- Toyibi, D., Suhirman, Alkusaeri, & Setiawan, Y. (2023). Analisis Penerapan Pendekatan Saintifik dalam Pembelajaran di SMA Se-Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat. *Jurnal Paramurobi*, 5(1). <https://doi.org/10.32699/paramurobi.v6i2.5997>
- Usmaedi. (2016). *Sekolah Pangreh Praja di Banten (osvia, 1910-1927)*. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten.
- Wahyuddin, W. (2016). Kontribusi Pondok Pesantren Terhadap NKRI. *Saintifika Islamica: Jurnal Kajian Keislaman*, 3(1).
- Wahyuni, F. (2015). Kurikulum dari Masa ke Masa (Telaah Atas Pentahapan Kurikulum Pendidikan Di Indonesia). *Al-Adabiya: Jurnal Kebudayaan dan Keagamaan*, 10(2).
- Yuniendel, R. K. (2024). Jejak Kolonialisme dalam Pendidikan Islam di Indonesia: Dari Tantangan Hingga Transisi. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 9(4). <https://doi.org/10.23969/jp.v9i04.20024>
- Zainullah, A., & Ali, N. (2023). Manajemen Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dalam Bidang Bahasa Arab. *BS Bahtsuna-Jurnal Pendidikan Islam*, 5(2). <https://doi.org/10.55210/bahtsuna.v5i2.312>
- Zein, M. F. (2021). *Adab sebelum Ilmu: Membangun Indonesia dengan Pendidikan dan Pembangunan Karakter Bangsa*. Mohamad Fadhilah Zein Digital Publishing.

Copyright holder:
© Author

First publication right:
Jurnal Kepemimpinan dan Pengurusan Sekolah

This article is licensed under:
CC-BY-SA